

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Metodologi Kajian Agama”

WACANA

Hasnim Fadhly-Hassan

**Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran
Jonathan H. Turner**

M. Ikhsan Tanggok

**Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian
Agama**

Agus Nugraha

Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal

Mohammad Nuh Hasan

**Teologi Pembebasan di Amerika Latin:
Perspektif Sosiologi Marxis**

Kusmana

**Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir Al-Qur'an di
Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan
Analisis Metodologis “Barat”**

TULISAN LEPAS

M. Amin Nurdin

**Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari
Pengalaman Australia**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IV, No. 3, 2002

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Kusmana

Anggota Redaksi

Din Wahid
Bustamin

Sekretariat

Burhanuddin

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 281-306 Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran Jonathan H. Turner
Hasnim Fadhlly-Hassan
- 307-320 Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Agama
M. Ikhsan Tanggok
- 321-330 Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal
Agus Nugraha
- 331-354 Teologi Pembebasan di Amerika Latin: Perspektif Sosiologi Marxis
Mohammad Nuh Hasan
- 355-364 Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan Analisis Metodologis "Barat"
Kusmana
- 365-406 Pengaruh Wahdat Al-Wujūd dalam Pemikiran Islam di Nusantara
Kautsar Azhari Noer

Document

- 407-418 Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari Pengalaman Australia
M. Amin Nurdin
- 419-438 Aborsi dalam Perspektif Agama-agama Samawi
Tien Rohmatin

METODOLOGI KAJIAN AGAMA

DALAM Vol. IV, No. 3, 2002 *Refleksi* mengusung tema pendekatan atau metodologi kajian agama. Tema ini akan diusahakan diangkat sekali dalam setiap periode satu tahunnya. Dalam konteks proses pendidikan agama Islam umumnya dan proses pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat khususnya dirasakan perlunya pemakaian pendekatan yang non-normatif atau pendekatan historis untuk mendorong berkembangnya model pemahaman keagamaan yang terbuka, di satu sisi dan mendorong tradisi keilmuan yang kuat di sisi lainnya. Karenanya, pewacanaan penggunaan pendekatan-pendekatan historis dalam kajian agama dan publikasi tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut perlu disosialisasikan dengan frekuensi yang relatif sering.

Dalam edisi kali ini, kami memilih delapan tulisan dari sekian tulisan yang masuk ke meja redaksi. Enam tulisan mengisi rubrik wacana dan dua tulisan mengisi rubrik lepas. Tulisan rubrik wacana yang pertama ditulis oleh Hasnim Fadhly-Hassan, yaitu *Teori Konflik: Sebuah Review atas Pemikiran Jonathan H. Turner*. Hassan me-review teori konflik Turner. Mengikuti struktur penulisan Turner, ia membahas asal-usul dan perspektif-perspektif teori konflik, mulai dari Marx, Simmel, dan Weber sampai teori konflik Dahrendorf, fungsionalisme konflik Coser dan teori pertukaran Collins. Teori konflik ini bisa digunakan sebagai basis bagi pengembangan teori dalam memahami konflik-konflik yang terjadi dewasa ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang berbasis agama ataupun etnik. Selanjutnya, *Penggunaan Metode Etnografi dalam penelitian Agama*, tulisan M. Ikhsan Tanggok. Dia membahas pengertian, sejarah, tujuan, kerangka, prosedur penelitian etnografi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode ini. *Ketiga* tulisan Agus Nugraha, *Pemikiran Politik Islam: Suatu Pengantar Awal*, membahas pemikiran politik Islam tidak secara rinci dan mendalam, akan tetapi hanya untuk menghantarkan suatu wawasan umum tentang khazanah pemikiran politik. *Keempat*, tulisan Mohammad Nuh Hasan, *Teologi Pembebasan di Amerika Latin: Perspektif Sosiologis Marxis*. Nuh menjelaskan bahwa

kemunculan teologi pembebasan di Amerika Latin didorong oleh dinamika sosial setempat yang memang keras. Yang menarik dari tulisannya adalah analisis Marxis mempunyai peran signifikan dalam membentuk corak gerakan dan pemikiran teologi pembebasan di sana. *Kelima*, tulisan Kusmana *Rekontekstualisasi Tradisi Tafsir al-Qur'an di Indonesia di Indonesia: Mencari Kemungkinan Penggunaan Analisis Metodologis "Barat."* Kusmana memetakan faktor-faktor pembentuk tradisi tafsir di Indonesia baik yang datang dari Timur Tengah maupun dari Barat. Dia melihat keperluan untuk menyinergikan dua tradisi keilmuan besar ini dan tidak diperlakukan terpisah, karena pada dasarnya keduanya bertumpu pada dasar dan prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip ilmiah. karenanya tidak ada halangan sedikit pun dalam kajian al-Qur'an seperti tafsir meminjam analisis ilmu yang berkembang di Barat. Dia menyimpulkan pentingnya penggunaan analisis sejarah, komparatif, kontekstual dan hermeneutik dalam kajian tafsir ke depan di Indonesia. *Keenam*, tulisan Kautsar Azhari Noer *Pengaruh Wahdat al-Wujūd dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Noer dengan menggunakan analisis sejarah mendiskusikan kemunculan, perkembangan dan pasang surut konsep *wahdat al-wujud* di Nusantara. Dia menjelaskan perkembangan konsep ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengitarinya: rumitnya konsep menjadi daya tarik dan tolak sekaligus, respons atas modernisme misalnya yang melihat sesuatu berdasar logika yang sederhana tegas dan jelas tidak mendorong tumbuhnya apresiasi atas konsep *wahdat al-wujud*. Namun demikian kemunculan kecenderungan kontemporer mendorong tumbuh kembalinya apresiasi tersebut.

Dua tulisan terakhir mengisi rubrik tulisan lepas. Pertama, tulisan M. Amin Nurdin, *Agama dan Multikulturalisme: Belajar dari Pengalaman Australia*, mendiskusikan hubungan agama dan multikulturalisme di Australia dan menjadikan pengalaman Australia sebagai *second opinion* dalam memahami persoalan hubungan tersebut di Indonesia dengan mencoba memberi tawaran solusi atas persoalan konflik etnis dan agama di tanah air. Terakhir, kedua, tulisan *Tien Rohmatin Aborsi dalam perspektif Agama-agama Samawi*, mendiskusikan tentang aborsi, mengapa aborsi itu dilakukan dan bagaimana pandangan agama-agama samawi-Islam Kristen dan Yahudi mengenai hal ini. Selamat membaca.

Ciputat, 20 November 2002

Tim Redaksi

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM: SUATU PENGANTAR AWAL

Agus Nugraha

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat, bahwa pada zaman pertengahan, selama kurang lebih tujuh abad, Islam telah berjaya mendominasi peradaban dunia, termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan. Para pemikir Islam muncul sebagai penggagas dalam berbagai disiplin ilmu, misalnya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, al-Khawarizmi di bidang ilmu matematika, Ibnu Khaldun dalam sosiologi dan Jabir ibn Hayyan dalam ilmu kimia. Begitu pula dalam disiplin ilmu politik, ada al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Kota Baghdad, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M), telah pula menjadi pusat studi keilmuan dan kiblat peradaban dunia.¹ Akan tetapi setelah runtuhnya kekhalifahan

Islam, dan Barat mengambil alih kuasa dunia, sumbangan para pemikir muslim dalam dunia keilmuan menjadi nyaris tak terdengar. Sebaliknya pemikiran Baratlah yang mendominasi referensi ilmu dan kepustakaan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran politik Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna kembali melacak khazanah pemikiran politik yang telah diasaskan oleh para pemikir Islam terdahulu.

Dalam tulisan singkat ini, tidaklah bermaksud untuk membahas pemikiran politik Islam secara rinci dan mendalam, akan tetapi hanya untuk menghantarkan suatu wawasan umum tentang khazanah pemikiran politik.

Beberapa Konsep Dasar tentang Pemikiran Politik Islam

Sampai saat ini, penulis belum menemukan suatu pengertian atau definisi dari pemikiran politik Islam, yang diberikan para sarjana. Umumnya buku-buku yang ada, secara langsung saja menguraikan pemikiran-pemikiran para tokoh tentang politik Islam, dengan tanpa memberikan batasan terlebih dahulu apa itu pemikiran politik Islam, Hal ini mungkin dipandang sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu diberikan batasan lagi. Untuk itu, guna memberikan sedikit pemahaman tentang term pemikiran politik Islam, penulis mencoba menelusuri beberapa konsep dasar yang turut membentuknya. Apa itu pemikiran, apa itu politik, apa pemikiran politik dan akhirnya dikaitkan dengan Islam itu sendiri. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terbentuk satu kesatuan pengertian dari pemikiran politik Islam.

Pemikiran secara umum dapat diartikan sebagai hasil dari proses berpikir seseorang atau sekelompok orang. Pikiran adalah “hasil berpikir.” Sedangkan pemikiran adalah “proses, cara, perbuatan memikir.” Pemikiran adalah akumulasi dari pikiran.² Pemikiran politik berarti pemikiran tentang politik. Politik di sini diartikan sebagai ilmu dan seni mengenai ketatanegaraan, urusan pemerintahan negara, ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan negara.³ Jadi politik dipahami dalam pengertian umum yakni sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan dan kekuasaan. Menurut A. Rahman Zaimuddin, yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan

diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik, di mana pemikiran politik erat kaitannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan etika, moralitas dan idealisme politik.⁴

Sementara itu, dalam pandangan Abdul Azis Thaba, pemikiran politik adalah segala upaya manusia dengan menggunakan akal pikirannya untuk mencapai suatu sistem politik ideal, yaitu sistem politik yang konstruktif dengan perkembangan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Ketika manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan politik, ia berpikir untuk memilih atau menentukan pilihannya atas berbagai alternatif tindakan.⁵ Dalam berpikir politik, manusia dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Yang pertama, berupa nilai-nilai yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama yang dianutnya, ideologi yang diyakininya, visi politiknya, dan sebagainya. Sementara yang kedua adalah kondisi lingkungan di mana ia berada, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan pertahanan keamanan.⁶

Pemikiran politik seseorang, tidak dapat dilepaskan dari realitas yang terjadi dalam masyarakat pada masanya. Karena itu, dalam pandangan David Thomson, pemikiran politik hanya dapat dipahami sepenuhnya dengan menghubungkannya dalam konteks waktu, tempat dan personalitas di mana tokoh pemikir itu muncul. Tetapi ide-ide seorang pemikir besar tidak perlu mewakili pemikiran masanya.⁷ Setiap pemikir memiliki persepsi tersendiri tentang realitas sosial politik yang dihadapi masyarakat pada masanya serta bagaimana kondisi ideal yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan. Refleksi atas realitas itu akan itu akan mempengaruhi corak pemikiran yang dikemukakannya.⁸ Menurut A. Rahman Zainuddin, dengan memperhatikan pemikiran para pemikir politik sepanjang sejarah, dapat diperhatikan bahwa setiap pemikir mempunyai obsesinya masing-masing. Mengambil kesimpulan dari pemikiran seorang pemikir tanpa memperhatikan obsesi utamanya, mungkin sekali akan menyampaikan kita kepada suatu kesimpulan yang salah atau sekurang-kurangnya tidak tepat. Yang dimaksud dengan obsesi di sini adalah jenis pemikiran yang mencekam di benak sang pemikir itu sepanjang waktu, karena masalah itu amat dominan dan amat penting dibandingkan dengan yang lain-lain sehingga jarang sekali ia dapat melepaskan diri dari padanya.⁹

Akhirnya, kualitas hasil pemikiran seseorang antara lain ditentukan oleh potensi intelektual yang dimilikinya, kemampuan berpikir bebas,

pengaruh latar belakang sosial budaya yang pernah dialaminya, dan perkenalan dengan dunia luar atau pemikir-pemikir lain (seperti melalui pendidikan dan bacaan) yang dapat dipakainya sebagai pembanding. Pendek kata, di samping faktor kecerdasan, corak pemikiran seseorang juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang pernah dilaluinya.¹⁰

Kata “Islam” dalam topik “pemikiran politik Islam menunjuk kepada sifat kekhususan kajian yang dibatasi oleh nilai-nilai ajaran yang berasal dari Islam. Dalam konteks pemikiran politik Islam, sistem politik ideal adalah sistem politik islami. Persoalan menjadi menarik karena timbulnya aneka pendapat tentang sistem politik tersebut meskipun mereka merujuk pada sumber yang sama, yaitu al-Qur’an, Sunnah Rasulullah, dan ijtihad para ulama. Perbedaan terjadi pada saat menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, sebab sumber tersebut bersisi hal-hal yang bersifat pokok.¹¹

Permasalahan yang menjadi bahan pemikiran politik dari para pemikir Islam antara lain:

- 1) Adakah sistem ketatanegaraan Islam?;
- 2) Jika ada, seperti apakah negara itu? Dan apakah kita wajib mendirikannya?;
- 3) Bagaimanakah proses pembentukan negara?;
- 4) Apakah landasan ideologis dan konstitusionalnya?;
- 5) Apakah tujuan negara? Bagaimanakah mencapainya?;
- 6) Dari manakah sumber kekuasaan negara?;
- 7) Siapakah yang berhak melaksanakannya?;
- 8) Apakah syarat-syarat menjadi pemimpin? Bagaimanakah cara memilihnya?;
- 9) Kepada siapakah ia bertanggung jawab? Bagaimanakah cara dan bentuk pertanggungjawaban itu?;
- 10) Bagaimana posisi syariah dalam negara?;
- 11) Bagaimanakah pengaturan kelembagaan kenegaraan? Lembaga-lembaga politik apa saja yang perlu ada? Apa pula fungsi-fungsinya?;
- 12) Bagaimanakah rumusan konsep keadilan, persamaan, dan hak-hak asasi manusia dan pelaksanaannya dalam negara?;
- 13) Bagaimanakah hubungan dengan luar negara?.¹²

Periodisasi Pemikiran Politik Islam¹³

Pemikiran politik yang berkembang dalam dunia Islam secara garis besarnya dapat dibedakan atas tiga periode, yaitu pemikiran politik Islam pada zaman klasik, pertengahan dan zaman modern. Biasanya, zaman klasik dan pertengahan pembahasannya digabungkan karena memiliki pokok-pokok pemikiran yang serupa.

1. Zaman Klasik dan Pertengahan

Di bawah pemerintahan Abbasyiah, dunia ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang pesat dan karenanya sering dirujuk dengan masa keemasan, khususnya dalam dua ratus tahun pertama dari lima ratus tahun kekuasaan dinasti tersebut. Berkat dukungan penguasa pasca masa itu, kegiatan para ilmuwan dalam berbagai bidang berkembang pesat. Para ahli bahasa Arab, dengan penuh gairah menyusun kaidah-kaidah bahasannahwu dan sharaf. Para ahli Hadist, juga menyusun buku-buku kumpulan Hadits, khususnya Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Dalam bidang ilmu hukum Islam (*fiqh*), mazhab-mazhab bermunculan dan empat dari padanya masih bertahan sampai sekarang yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Makmun, Khalifah Abbasyiah yang ketujuh, sangat besar perhatiannya kepada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya terbatas pada ilmu agama dan sosial, tetapi juga ilmu lain seperti ilmu pasti dan ilmu alam. Dia juga pengagum ilmu-ilmu Yunani, termasuk filsafatnya. Beliau memerintahkan untuk melengkapi perpustakaan negara Bait Al-Hikmah dengan buku-buku asing di samping buku-buku Islam, dan juga memerintahkan membeli karya-karya tulis Yunani kemudian disalin dalam bahasa Arab. Dengan demikian perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani makin meluas dan mendalam. Maka lahirlah sejumlah pemikir Islam yang mengemukakan gagasan politiknya melalui karya tulis.

Sarjana Islam yang pertama yang menuangkan gagasan politiknya dalam suatu karya tulis adalah Ibnu Abi Rabi', yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu'tashim, khalifah Abbasyiah kedelapan. Setelah Abi Rabi' kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasyiah di Baghdad, dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 Masehi. Mereka ini dapat dikatakan sebagai tokoh-tokoh yang

mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada zaman Klasik dan Pertengahan.

Beberapa hal pokok dari pemikiran politik Islam masa klasik dan pertengahan:¹⁴ *Pertama*, dari enam pemikir yang hidup pada masa ini, Ibnu Abi Rabi, al-Farabi, al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, hanya al-Farabi yang mengemukakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara. Sedangkan pemikir lainnya berangkat dari pada realitas sistem kekuasaan. Pemikiran politik al-Farabi banyak dipengaruhi oleh model Platonik sehingga model negara yang diajukannya, “negara utama” (*al-Madinah al-Fadhilah*) termasuk dalam model utopian, mirip dengan Plato. *Kedua*, Keenam pemikir ini sangat dipengaruhi oleh alam pemikiran Yunani tentang asal mula negara. Bedanya, pemikiran pemikir Islam diwarnai akidah Islam. Di antara mereka pun terdapat banyak perbedaan. Ibnu Arabi, Ghazali dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan kepala negara atau raja merupakan mandat Allah yang diserahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih sehingga kepala negara atau raja merupakan khalifah (pengganti) Allah di muka bumi. Al-Ghazali menandakan bahwa kekuasaan kepala negara itu *muqaddas* (suci) sehingga tidak dapat diganggu gugat. Al-Mawardi menganggap, kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban kepala negara dan rakyatnya. Dengan demikian, al-Mawardi dapat dianggap pelopor utama teori kontrak sosial karena tiga serangkai dari Barat yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau baru membicarakan lima abad kemudian.

Kecuali al-Mawardi, para pemikir lain menganggap bahwa kekuasaan kepala negara berlaku seumur hidup. Mereka tidak pernah memikirkan mekanisme penggantian kepala negara. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menerima seorang kepala negara yang zalim lebih baik daripada tidak memiliki kepala negara. al-Mawardi adalah Satu-satunya tokoh yang menguraikan proses pemilihan dan pergantian kepala negara. Ia juga mengemukakan kemungkinan dijatuhkannya kepala negara apabila ia tidak mampu lagi memerintah karena faktor jasmani, rohani, atau akhlak. Dengan tegas, Mawardi dan Ghazali mensyaratkan bahwa kepala negara harus berasal dari suku Quraisy, sementara Ibnu Khaldun merasionalkannya dengan teori Abbasiyah. *Ketiga*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dasar kebijakan dan peraturan negara seharusnya berasal dari ajaran dan hukum agama, bukan hasil karya manusia. *Keempat*, Ibnu Taimiyah yang

terkenal puritan, zahid, dan keras pendiriannya, mendambakan keadilan sedemikian rupa sehingga ia sepakat bahwa kepala negara yang bukan muslim tetapi adil lebih baik dari pada kepala negara yang muslim tetapi tidak adil.

2. Zaman Modern

Jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ke-13 M, menandai tamatnya dinasti Abbasyiah dan juga mencerminkan hilangnya kepemimpinan tunggal bagi seluruh dunia Islam. Meskipun kepemimpinan pusat telah tiada, dunia Islam masih terus berkembang meluaskan wilayah kekuasaan di bawah pimpinan sejumlah penguasa lokal yang bertebaran di dunia Islam, dengan gelar raja, sultan dan sebagainya.

Terjadinya disintegrasi politik, kalahnya perang dengan ekspansi dunia Barat, serta merosotnya spiritualitas dan moralitas masyarakat terutama para penguasanya, mengakibatkan mundurnya dunia Islam dan kukuhnya penjajahan Barat. Dengan kondisi ini mengentalah pendapat dan keyakinan bahwa: 1. Hal-hal tersebut terjadi oleh karena ajaran Islam yang diamalkan dan dihayati umat Islam, bukan lagi ajaran Islam yang murni, tetapi ajaran yang sudah tercemar dengan masuknya unsur-unsur luar yang tidak islami. 2. Untuk meraih kembali kejayaan yang pernah dicapai pada masa “keemasan” dahulu, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad.

Berdasarkan pada pendapat dan keyakinan tersebut, muncullah gerakan-gerakan pembaharuan yang berusaha untuk memurnikan kembali ajaran Islam. Misalnya di jazirah Arab, gerakan pemurnian kembali ajaran Islam dipelopori oleh Syeikh Mohammad bin Abdul Wahab yang hidup pada tahun 1703 sampai 1792. Dengan demikian sejarah mencatat bahwa sejak akhir abad pertengahan sampai menjelang akhir abad ke-19, pemikiran politik Islam berada dalam kegelapan. Hanya Abdul Wahab yang cukup menonjol dalam masa ini, itu pun gerakan pemikirannya lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam, dan bukan mengarah pada pemikiran politik sebagaimana yang telah diasaskan oleh para pemikir pada zaman klasik dan pertengahan.

Sementara itu pemikiran politik yang kemudian muncul pada zaman modern yang dimulai pada akhir abad ke-19, secara umum dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut ini:

- 1) Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang kemudian berakibat pada tumbuhnya gerakan pembaruan dan pemurnian.
- 2) Masuknya imperialisme Barat ke sebagian besar wilayah dunia Islam yang berakibat pada penjajahan Barat, membangkitkan semangat perlawanan Islam dan sikap anti Barat.
- 3) Keunggulan Barat dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan organisasi.

Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi para pemikir pada zaman ini, yang umumnya berorientasikan pada pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam dengan berbagai nuansanya. Banyak di antara para pemikir pada masa ini tidak mengetengahkan konsepsi tentang sistem politik Islam, melainkan hanya merupakan konsepsi perjuangan politik umat Islam sama ada terhadap kezaliman para penguasa, lebih-lebih terhadap imperialis dan kolonialis Barat. Perhatian mereka lebih banyak dipusatkan pada perjuangan pembebasan dunia Islam dari dominasi Barat, mirip dengan pejuang-pejuang nasional di daerah jajahan. Kiranya Maulana Maududi merupakan salah seorang pemikir Islam kontemporer yang mencoba menyajikan suatu konsepsi politik Islam yang relatif utuh, lengkap dan asli.

Mereka yang terkenal pada masa ini adalah al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Ridha, al-Raziq, Hasan al-Bana, Sayyid Qutb, al-Maududi, Muhammad Husain Haikal, Muhammad Iqbal, Ismail al-Faruqi, dan sebagainya.

Corak Pemikiran Politik Islam¹⁵

Secara umum ada tiga kelompok pemikir politik Islam yang mempunyai corak pemikiran yang cukup berbeda. *Pertama*, kelompok yang sangat anti Barat dan berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Mereka berpendirian bahwa sistem politik ideal adalah sistem yang dipraktikkan pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Termasuk dalam kelompok ini di antaranya adalah Rasyid Ridha, Sayid Qutb, dan al-Maududi.

Kelompok *kedua*, menganggap bahwa Islam memiliki kedudukan yang sama dengan agama lain, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, nabi Muhammad hanyalah seorang rasul

biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia mewujudkan kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Dengan demikian adanya. Nabi bukanlah dimaksudkan untuk mendirikan atau mengepalai satu negara. Tokoh utama dari aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran yang terakhir, tidak sependapat dengan kelompok pertama dan juga menolak pandangan aliran yang kedua. Kelompok ketiga ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana realisasinya tergantung pada ijtihad masing-masing. Termasuk tokoh dalam kelompok ini adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup populer dan penulis buku *Hayatu Muhammad dan Fi Manzil al-Wahyi*.

Catatan Kaki

1. Banyak buku yang membahas tentang hal ini, sekedar untuk menyebut dua di antaranya: Nurcholis Madjid (ed), *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1990.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 683.
3. Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 1160.
4. A. Rahman Zainuddin, "Pemikiran Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 7, AIPI-LIPI Gramedia, 1990, hlm. 3.
5. Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 84.
6. *Ibid.*
7. David Thomson, *Pemikiran-pemikiran Politik*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986, hlm. 19.
8. Soemarno, "Pemikiran Politik Amien Rais dan Implikasinya terhadap Hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah", *Proposal Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, 1997, hlm. 8.
9. A. Rahman Zainuddin, "Machiavelli dan Kekuasaan: Peranan Obsesi Dalam pemikiran Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 4, AIPI-LIPI-Gramedia, 1989, hlm. 101.
10. Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 9.
11. Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 85.
12. *Ibid.*, hlm. 86-87.
13. Disarikan dari Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 41-210.
14. *Ibid.*
15. Ringkasan ini diambil dari Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 85.

Daftar Pustaka

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Madjid, Nurcholis (ed), *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Salim, Peter dan Salim, Yeny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Soemarno, "Pemikiran Politik Amien Rais dan Implikasinya terhadap Hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah", *Proposal Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, 1997.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thomson, David. *Pemikiran-pemikiran Politik*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986.
- Zainuddin, A. Rahman. "Machiavelli dan Kekuasaan: Peranan Obsesi dalam pemikiran Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 4, AIPI-LIPI-Gramedia, 1989.
- Zainuddin, A. Rahman. "Pemikiran Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 7, AIPI-LIPI Gramedia, 1990.

Agus Nugraha, lahir di Tasikmalaya, 1 Agustus 1968. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) pada Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1992. Pada tahun 1993 menjadi dosen pada FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya mengikuti studi pada Program Magister Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia, selesai tahun 1998. Mulai tahun 1999 menjadi dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004